

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. IKHTISAR KINERJA

Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan SK LAN No. 239/VI/8/9/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu salah satunya dengan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010.

Pemerintah Kota Cimahi mempunyai Visi “ Dengan Iman , Taqwa, Optimis dan Cerdas, Jadikan Cimahi Kota Maju, Agamis, Nyaman, Tertib, Aman dan Produktif ”. Untuk mencapai visi tersebut, Kota Cimahi telah menetapkan misi yang harus diembannya yaitu;

- a. Meningkatkan Sarana Perekonomian dan Lapangan Kerja;
- b. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
- c. Meningkatkan Penataan dan Penegakan Hukum;
- d. Meningkatkan Infrastruktur Kota;
- e. Mengendalikan Pembangunan agar Berwawasan Lingkungan;
- f. Meningkatkan Kemitraan dengan Dunia Usaha.

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan melalui pencapaian Program serta Indikator Makro.

- **Misi Satu** : **Meningkatkan Sarana Perekonomian dan Lapangan Kerja**, dicapai melalui 23 (dua puluh tiga) program yang didukung dengan 39 (tiga puluh sembilan enam) Indikator Program, indikator kinerja nilai capaiannya antara sebesar 100% - 184,62%.
- **Misi Dua** : **Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan**, dicapai melalui 35 (tiga puluh lima) program yang didukung dengan 78 (tujuh puluh delapan) Indikator Program, indikator kinerja nilai capaiannya antara sebesar 80,00% - 170,45% dengan rata-rata capaian 101,17%.
- **Misi Tiga** : **Meningkatkan penataan dan penegakan hukum**, dicapai melalui 39 (tiga puluh sembilan) program yang didukung dengan 87 (delapan puluh enam) Indikator Program, dengan nilai capaiannya antara 33,33% - 250% dengan rata-rata capaian 101,58%.
- **Misi Empat** : **Meningkatkan Infrastruktur Kota**, dicapai melalui 14 (empat belas) program yang didukung dengan 35 (tiga puluh lima) Indikator program dengan rata-rata capaian 99,41%.
- **Misi Lima** : **Mengendalikan Pembangunan Agar Berwawasan Lingkungan**, dicapai melalui 8 (delapan) program yang didukung dengan 17 (tujuh belas) Indikator Program, rata-rata capaian adalah 99,56%.

- **Misi Enam** : **Meningkatkan Kemitraan Dengan Dunia Usaha**, dicapai melalui 1 (satu) program yang didukung dengan 1 (satu) Indikator Program, nilai capaiannya sebesar 100%.

Persentase pencapaian tersebut di atas merupakan gambaran keberhasilan pembangunan di Kota Cimahi. Selain daripada itu penghargaan yang diterima tingkat nasional pada tahun 2010, yaitu *Anugrah Adipura sebagai Kota Terbaik dalam pengelolaan perkotaan untuk kategori kota sedang dan Citra Bhakti Abdi Negara (Bidang Pelayanan Publik)* yang keduanya diserahkan Presiden RI, merupakan kondisi yang sebenarnya mengenai kualitas pembangunan di Kota Cimahi dan mendapatkan pengakuan berupa penghargaan.

Hal ini akan menjadi pemacu dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dan untuk mempertahankan serta memperbaiki kinerja yang telah dicapai. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya kerjasama yang konstruktif dan saling menunjang diantara pihak yang terkait, sehingga dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Kota Cimahi.

Sebagai penutup, semoga LAKIP tahun 2010 memberikan informasi capaian kinerja yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi pertanggungjawaban, media pertanggungjawaban kepada publik dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita selalu.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran

- 1) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam satu periode pelaporan.
- 2) Laporan Realisasi Anggaran memuat :
 - a) Unsur-unsur pendapatan
 - b) Unsur-unsur belanja
 - c) Unsur-unsur transfer
 - d) Unsur-unsur surplus/defisit
 - e) Unsur-unsur pembiayaan
 - f) Unsur-unsur sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Neraca

- 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Cimahi menganut Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*).

Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2010 adalah per 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010

- 2) Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah:
 - a) Basis Kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan

- b) Basis AkruaI digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- 3) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomi adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan didasar laut, dan kandungan pertambangan yang belum dieksplorasi.
- 4) Kas
 - a) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah
 - b) Pencatatan kas menggunakan basis kas
 - c) Kas di Kas Daerah dan di Bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal neraca.
 - d) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil opname kas di masing-masing pemegang kas (Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran).
- 5) Piutang
 - a) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi
 - b) Piutang adalah transaksi yang terjadi antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan
 - c) Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar nilai nominal
 - d) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut
 - e) Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah / Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD)
- 6) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
 - a) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
 - b) Perkiraan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar TGR dinilai sebesar nilai nominal

- c) Perkiraan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar TGR diakui pada saat timbulnya hak atas bagian lancar dari Tuntutan Perbendaharaan dan TGR.

7) Persediaan

- a) Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan atau dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- b) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
 - Biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Biaya standar atau biaya produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- c) Jenis-jenis persediaan :
 - Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK;
 - Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misalnya *box file*;
 - Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan , misalnya *spare part* bekas kendaraan bermotor yang masih bisa digunakan;
 - Persediaan untuk dijual, misalnya aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kesehatan, bibit, benih ikan dan sebagainya.

8) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Lembaga keuangan lainnya dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dicatat dalam neraca sebesar nilai nominal dengan memperhatikan metode cost dan metode equity.

9) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.

Kebijakan penilaian aset tetap menggunakan standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku untuk instansi pemerintah.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penggunaan aset tetap sampai dengan saat ini belum dihitung penyusutannya. Terhadap aset tetap yang kondisinya rusak berat diklasifikasikan sebagai aset lainnya.

10) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan baru dicatat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut. Apabila penilaian konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan SP2D yang diterbitkan tidak memungkinkan, maka nilai konstruksi dalam pengerjaan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada saat perolehan.

11) Built, Operate, and Transfer (BOT)

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak lain tersebut membangun dan/atau sarana lain beserta fasilitas diatas tanah tersebut, serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali tanah, bangunan, atau sarana lain beserta fasilitasnya tersebut beserta pendaagunaannya kepada negara setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

12) Dana Bergulir

Dana Bergulir meliputi Program Pengembangan Usaha Kecil. Program Dana Bergulir berupa bantuan pinjaman penyaluran modal kepada pengusaha kecil sesuai dengan program Pemerintah Kota Cimahi. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Bank Jabar Cabang Cimahi.

Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah disalurkan dari Pemerintah Kota Cimahi kepada Bank Jabar Cabang Cimahi.

Program Pengembangan Usaha Kecil berupa bantuan kepada Usaha Kecil dibawah Bagian Bina Ekonomi dalam bentuk bantuan dengan bunga lunak, periode pinjaman 2 tahun dan bertujuan untuk penguatan Perekonomian Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah Kota Cimahi.

13) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban lancar yang harus dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban ini dibukukan sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

- a) Bagian Lancar (BL) Kewajiban Kepada Pemerintah Pusat
- b) Merupakan Bagian Kewajiban Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Kewajiban Jangka Pendek, karena telah jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- c) Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga
- d) Merupakan Kewajiban Jangka Pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- e) Kewajiban Bunga, Denda dan *Commitment Fee*

- f) Kewajiban Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada *Lender* melalui DP3 (Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman) – Departemen Keuangan, atas realisasi pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, serta waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam pinjaman.

Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemerintah Daerah tidak dapat melunasi angsuran pokok maupun bunganya tepat waktu dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati bersama.

Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditariknya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

14) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Kewajiban jangka panjang dicatat pada saat dana tersebut diterima sebesar nominal. Nilai kewajiban dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari :

a) Kewajiban Kepada Pemerintah

Kewajiban jangka panjang kepada pemerintah adalah bagian kewajiban kepada pemerintah pusat yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi

b) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang

Kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang merupakan kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi

15) Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah hak residual atas aset Pemerintah Kota Cimahi setelah dikurangi semua kewajiban.

Ekuitas dana terdiri dari :

a) Ekuitas Dana Lancar

- b) Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih jumlah nilai Aset Lancar dikurangi dengan jumlah Kewajiban Jangka Pendek.

c) Ekuitas Dana Investasi

- d) Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai yang diinvestasikan dalam Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya, dibandingkan dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

- e) Ekuitas Dana Cadangan, merupakan kekayaan Pemerintah Kota Cimahi yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Laporan Arus Kas

- 1) Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 2) Arus masuk dan arus keluar kas diklasifikasikan berdasarkan
 - a) Aktivitas operasi
 - b) Aktivitas investasi nonkeuangan
 - c) Aktivitas pembiayaan
 - d) Aktivitas non anggaran

3. ORGANISASI PEMERINTAH KOTA CIMAHI

a. Pola Organisasi

Pola organisasi Pemerintah Kota Cimahi ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Cimahi dengan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi yaitu sebagai berikut :

- 1) Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi yaitu DPRD Kota Cimahi yang dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- 2) Badan Eksekutif yaitu Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a) Walikota;
 - b) Sekretariat Daerah;
 - c) Dinas Daerah;
 - d) Lembaga Teknis Daerah;
 - e) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g) Kecamatan;
 - h) Kelurahan;

b. Organisasi Sekretariat Daerah

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- 1) Asisten Pemerintahan terdiri dari :
 - a) Bagian Pemerintahan, terdiri dari 3 Sub Bagian
 - b) Bagian Hukum , terdiri dari 3 Sub Bagian
 - c) Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari 2 Sub Bagian
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - a) Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari 2 Sub Bagian
 - b) Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari 2 Sub Bagian

- c) Bagian Kesejahteraan, terdiri dari 3 Sub Bagian
- 3) Asisten Administrasi Umum
 - a) Bagian Keuangan, terdiri dari 3 Sub Bagian
 - b) Bagian Pengelolaan Aset, terdiri dari 3 Sub Bagian
 - c) Bagian Umum , terdiri dari 3 Sub Bagian
 - d) Bagian Organisasi, terdiri dari 2 Sub Bagian
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional

4. PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

a. Penjelasan Pos-pos Neraca

1)	Kas di Kas Daerah	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		96.024.002.012,61	116.164.546.318,61

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp96.024.002.012,61 merupakan saldo Kas Pemerintah Kota Cimahi yang dikelola oleh Bendahara Umum Kas Daerah per 31 Desember 2010. Saldo tersebut termasuk Utang PFK tahun 2009 sebesar Rp 11.795.639,00 dan 2010 sebesar Rp3.329.327.999 yang belum disetor ke Kas Negara.

2)	Kas di RSUD	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		4.139.466.434,00	2.556.354.337,00

Saldo Kas di RSUD sebesar Rp4.139.466.434,00 merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran RSUD, yang berasal dari pendapatan operasional rumah sakit. Tahun Anggaran 2009 Saldo Kas di RSUD masih digabungkan dengan Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD lain.

3)	Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		134.877.719,00	186.402.178,00

Saldo tersebut merupakan saldo kas yang ada di para Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan 31-12-2010 belum disetorkan ke rekening Kas Daerah dan Kas Negara. *Rincian saldo per SKPD selengkapnya disajikan pada lampiran 1*

4)	Piutang Pajak	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		2.749.378.660,31	1.186.780.715,46

Piutang Pajak sebesar Rp2.749.378.660,31 adalah kewajiban pihak ketiga atas penetapan pajak daerah yang sampai dengan 31 Desember 2010 belum dibayar dengan rincian sebagai berikut:

U R A I A N	NILAI	
- Pajak Daerah	Rp	255.000,00
- Bagi Hasil	Rp	2.749.123.660,31
	Rp	2.749.378.660,31

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 2

5)	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		34.370.875,00	34.370.875,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Perbendaharaan sebesar Rp34.370.875,00 merupakan saldo Tuntutan Perbendaharaan atas kasus kelalaian bendahara dalam pengelolaan keuangan rutin yang jatuh tempo pada tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian keuangan daerah (1 kasus)	Rp	41.570.875,00
- Penerimaan pembayaran	Rp	(7.200.000,00)
Saldo Tunt. Perbendaharaan	Rp	34.370.875,00
Saldo Tuntutan Perbendaharaan terdiri dari:		
- Sisa bagian lancar	Rp	34.370.875,00
- Saldo bagian jangka panjang	Rp	0,00
Jumlah	Rp	34.370.875,00

6)	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		510.447.075,00	173.259.850,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp510.447.075,00 merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi yang telah jatuh tempo tahun 2010 dan yang akan jatuh tempo dalam tahun 2010 atas kasus kerugian keuangan daerah karena kelalaian pegawai dan kehilangan aset dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian keuangan daerah (4 kasus)	Rp	409.477.500,00
Kerugian kehilangan aset daerah (11 kasus)	Rp	267.607.500,00
Jumlah	Rp	677.085.000,00
Penerimaan pembayaran	Rp	(119.896.000,00)
Saldo Tuntutan Ganti Rugi	Rp	557.189.000,00

Dari saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2010 sebesar Rp557.189.000,00, senilai Rp510.447.075,00 merupakan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Pada Tahun Anggaran 2010 Walikota memberikan keringan sebesar Rp15.800.000,00 tapi belum disertai SK Penghapusan Tuntutan Ganti rugi atas keringanan tersebut.

Rincian Bagian Lancar TP / TGR ada di Lampiran 8.

7)	Piutang Lainnya	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		3.665.300.091,00	6.777.052.899,00

Piutang Lainnya sebesar Rp3.665.300.091,00 merupakan Piutang Pelayanan Kesehatan di RSUD Cibabat, dan Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Pasar Antri Baru. Rincian piutang lainnya sebagai berikut :

<i>Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat</i>	Rp	2.759.237.301,00
<i>Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru</i>	Rp	224.137.525,00
<i>Piutang Kontribusi Cimahi Mall</i>	Rp	681.925.265,00
Jumlah	Rp	3.665.300.091,00

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 3

8)	Persediaan	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		4.951.317.442,78	3.537.771.342,33

Persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp3.420.022.673,61 adalah persediaan hasil inventarisasi yang dikelola oleh Bendahara Material pada dinas / badan / lembaga / instansi lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- Persediaan Habis Pakai	Rp	584.232.524,17
- Persediaan Tak Habis Pakai	Rp	178.369.550,00
- Persediaan untuk dijual/diserahkan	Rp	4.188.715.368,61
Jumlah	Rp	4.951.317.442,78

9)	Biaya Dibayar Dimuka	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		753.150.375,66	817.599.954,76

Saldo Biaya dibayar dimuka per 31-12-2010 sebesar Rp753.150.375,66 merupakan biaya dibayar dimuka atas sewa gedung, asuransi kesehatan dan asuransi kendaraan dinas. Biaya Dibayar Dimuka timbul karena pembayaran atas sewa/asuransi tersebut telah dilakukan pada tahun 2010, namun ada sisa periode/ manfaat pada tahun 2011.

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 5

10)	Dana Bergulir	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		1.162.855.646,00	1.183.880.759,00

Dana Bergulir per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.162.855.646,00 adalah dana yang akan disalurkan kepada kelompok pengusaha golongan ekonomi lemah yang dikelola oleh Bagian Administrasi Perekonomian.

Maksud dan tujuan penyediaan Dana Bergulir yaitu dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Cimahi melalui penyediaan permodalan yang murah dan mudah. Jumlah bantuan yang diberikan bervariasi mulai Rp2.000.000,00 s.d. Rp20.000.000,00 per kelompok. Dana Bergulir ini telah diberikan kepada 17 (tujuh belas) kelompok usaha kecil. Jangka waktu pinjaman untuk modal kerja tersebut maksimal adalah 2 (dua) tahun. Disamping itu juga terdapat dana bergulir yang diberikan kepada satu BMT dan ...Koperasi. Jangka waktu pinjaman maksimal adalah 3 tahun dengan jumlah maksimal Rp100.000.000,00

11)	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		68.778.945.800,98	67.609.628.214,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp68.778.945.800,98 meliputi penanaman modal Pemerintah Kota Cimahi kepada Bank Jabar sampai dengan 31 Desember 2010 nilainya sebesar Rp26.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1	Tahun 2002	A 51252724 s.d 51352723	1.000.000.000,00
2	Tahun 2003	A 68078382 s.d 68578381	5.000.000.000,00
3	Tahun 2004	A 86088523 s.d 86588522	5.000.000.000,00
4	Tahun 2005	A 107452762 s.d A 107952761	5.000.000.000,00
5.	Tahun 2006	A 126661855 s.d A 126911854	2.500.000.000,00
6.	Tahun 2007	A 149273979 s.d A 14952378	2.500.000.000,00
7.	Tahun 2008	-	2.500.000.000,00
8.	Tahun 2009	-	2.500.000.000,00
		Jumlah	26.000.000.000,00

Pada 31 Desember 2009 Bank Jabar Cimahi menerbitkan Surat Kolektif Saham Seri A nomor : 5981402104 s.d. 6075402103 untuk seluruh nominal Rp23.500.000.000,00. Penyertaan Modal Bank Jabar dicatat dengan menggunakan metode cost karena kepemilikan kurang dari 20%.

Sedangkan nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Cimahi kepada Perusahaan Daerah (PD) Jati Mandiri sampai dengan per 31 Desember 2010 sebesar Rp42.778.945.800,98 yang dicatat dengan metode equity karena kepemilikan lebih dari 20%.

Menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor: 10 Tahun 2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentang Pembentukan PD. Jati Mandiri, disebutkan bahwa jenis usaha meliputi bidang perdagangan, informatika dan telematika, air bersih, perumahan, dan jenis usaha lainnya.

12)	Aset Tetap	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		1.261.731.544.528,34	1.165.842.879.735,34

Jumlah tersebut merupakan hasil inventarisasi aset Pemerintah Kota Cimahi sampai dengan 31 Desember 2010 yang terdiri dari :

- Tanah	Rp	520.206.927.547,00
- Peralatan dan Mesin	Rp	141.763.999.031,34
- Gedung dan Bangunan	Rp	336.322.744.189,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	234.971.997.268,00
- Aset Tetap Lainnya	Rp	11.049.132.193,00
- Konstruksi Dlm Pengerjaan	Rp	17.416.749.300,00
Jumlah	Rp	1.261.731.544.528,34

Nilai tanah sebesar Rp520.206.927.547,00 adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi yang terdiri dari tanah kosong, tanah atas bangunan, tanah di bawah konstruksi jalan, tanah irigasi dan tanah darat sekitar daerah irigasi.

Nilai tanah per 31 Desember 2004 telah ditetapkan berdasarkan estimasi harga perolehan yang dibuat oleh konsultan appraisal PT Winarasabena kecuali tanah di bawah konstruksi jalan, tanah irigasi dan tanah darat sekitar daerah irigasi yang ditetapkan berdasarkan estimasi harga perolehan yang dibuat oleh Dinas Tata Kota Cimahi. Sedangkan penambahan nilai tanah selama tahun 2010 berdasarkan nilai perolehan.

Saldo Peralatan dan Mesin senilai Rp141.763.994.031,34 terdiri dari tiga kelompok, yaitu Alat Besar, Alat Angkutan dan Alat Lainnya.

Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2004 dinilai dengan harga perolehan dan untuk yang tidak diketahui harga perolehannya digunakan estimasi harga perolehan dengan menggunakan indeks yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan tahun tertua tahun 1978. Sedangkan penambahan nilai peralatan dan mesin selama tahun 2010 berdasarkan nilai perolehan.

Saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp336.322.744.189,00 adalah gedung dan bangunan milik Pemerintah Kota Cimahi berupa bangunan kantor, sekolah, dan bangunan lainnya yang terdapat pada instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Nilai Gedung per 31 Desember 2004 ditetapkan berdasarkan estimasi harga perolehan yang dibuat oleh konsultan appraisal PT Winarasabena. Sedangkan penambahan nilai gedung dan bangunan selama tahun 2010 berdasarkan nilai perolehan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 234.971.997.268,00 adalah nilai dari konstruksi jalan, jembatan, gorong-gorong, trotoar, bangunan air dan saluran. Yang dimaksud dengan jalan adalah jalan yang berstatus jalan kota.

Nilai konstruksi jalan, jembatan, gorong-gorong, trotoar, bangunan air dan saluran per 31 Desember 2004 ditetapkan berdasarkan estimasi harga perolehan yang dibuat oleh Dinas Tata Kota Cimahi. Sedangkan penambahan nilai selama tahun 2010 berdasarkan nilai perolehan.

Aset Tetap Lainnya per 31-12-2010 sebesar Rp11.049.132.193,00 adalah aset lainnya milik Pemerintah Kota Cimahi antara lain berupa buku-buku perpustakaan.

Rincian Aset Tetap selengkapnya disajikan pada Lampiran 6.

13)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		17.416.749.300,00	21.145.923.500,00

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp17.416.749.300,00 ada pada ***Lampiran 7.***

14)	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		47.741.925,00	37.203.750,00

Saldo tersebut merupakan Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian lihat lampiran 8.

15	Aset Rusak Berat	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		309.512.500,00	309.512.500,00

Saldo Aset Rusak Berat merupakan Software SIMBADA dan LAN Sanditel yang tidak dapat digunakan lagi karena masih mengacu pada Kepmen no. 152 Tahun 2005 tentang Juknis Pengelolaan Barang Daerah. Nilai masing-masing Rp202.730.000 dan Rp106.782.500.

16)	Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		82.817.000,00	39.567.000,00

Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp39.567.000,00 merupakan software aplikasi kenaikan gaji berkala dan Rp43.250.000,00 merupakan software sistem otomatisasi absensi pada Kantor Kepegawaian Daerah.

17)	Built, Operate, and Transfer – BOT	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		3.348.345.000,00	3.348.345.000,00

Nilai BOT sebesar Rp 3.348.345.000,00 adalah nilai estimasi harga perolehan atas tanah seluas +/- 8.575 m² yang diinvestasikan dengan cara kemitraan antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Bumi Kencana Indah untuk pembangunan Pusat Perdagangan Pasar Antri yang berlokasi di Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan Nomor Perjanjian :

180 / 07 Perj-/2003 tanggal 17 Juli 2003.

008/Perj/BKI/VII/03

18)	Utang PFK	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		3.390.877.701,00	64.271.274,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp3.877.874.051,00 merupakan selisih antara jumlah pemungutan oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran SKPD dikurangi jumlah yang disetor ke rekening Kas Negara atas PPh pasal 21, 22, 23 dan PPN. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tersebut terdiri dari Utang PFK di BUD sebesar Rp3.329.327.999,00 dan utang PFK di Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp548.642.643,00.

Jumlah saldo utang PFK tiap SKPD per 31 Desember 2010 tercantum pada Lampiran 1.

19)	Bagian Lancar Utang Pengelolaan Sampah	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		78.700.448,16	83.454.502,00

Bagian Lancar Utang Pengelolaan Persampahan merupakan kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dan harus dibayar pada tanggal 15 Januari 2011 sebesar Rp39.978.700,03 dan tanggal 15 Juli 2011 sebesar Rp38.721.748,13.

20)	Utang Lain-lain	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		9.089.902.082,00	6.668.844.524,00

Utang Lain-Lain per 31 Desember 2010 sebesar Rp9.089.902.082,00 merupakan saldo utang kepada pihak ketiga atas biaya pemeliharaan dan pembangunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2010, utang RSU Cibabat kepada rekanan serta utang kepada RS atas pelayanan Jamkesda. *Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 9.*

21)	Utang Kepada Pemerintah Pusat	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		12.832.623.298,00	12.832.623.298,00

Utang kepada Pemerintah Pusat merupakan utang sesuai dengan naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Cimahi dengan nomor : SLA-1208/DP3/2009 tanggal 18 April 2009. Saldo utang sebesar Rp12.832.623.298,00 sesuai jadwal pembayaran per 31 Desember 2010. Sesuai dengan naskah perjanjian, pembayaran angsuran pertama mulai dibayarkan pada tanggal 20 Maret 2011 dan terakhir tanggal 20 September 2025.

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 13.

22)	Utang Prasarana Persampahan	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		73.953.164,02	152.653.612,00

Merupakan kewajiban jangka panjang berdasarkan kontrak antara Kabupaten dengan Kota Bandung Nomor 236 Tahun 2003 tanggal 22-4-1993

5 Tahun 1993

Perihal Kerjasama Pengadaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah di Kotif Cimahi sebesar Rp1.113.220.847,00. Setelah menjadi Pemerintah Kota Cimahi, utang tersebut menjadi tanggungan Pemerintah Kota Cimahi. Jumlah Utang Jangka Panjang yang harus dibayar s.d. Tahun 2012 sebesar Rp73.953.164,02.

23)	Ekuitas Dana Lancar	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		100.399.763.287,70	124.617.568.169,79

Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2010 adalah selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek, dengan rincian sebagai berikut:

-	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SILPA)	Rp	96.907.441.706,61
-	Pendapatan Yang Ditangguhkan	Rp	26.867,00

-	Cadangan Piutang	Rp	6.959.496.701,31
-	Cadangan Persediaan	Rp	4.948.250.167,28
-	Cadangan Biaya Dibayar Dimuka	Rp	753.150.375,66
-	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	Rp	(9.168.602.530,16)
	JUMLAH	Rp	100.399.763.287,70

24)	Ekuitas Dana Investasi	31 Desember 2010	31 Desember 2009
		1.322.555.185.938,30	1.225.326.859.289,34

Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2010 adalah selisih antara jumlah nilai Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang, dengan rincian sebagai berikut:

-	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	Rp	69.941.801.446,98
-	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp	1.261.731.544.528,34
-	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	Rp	3.788.416.425,00
-	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	Rp	(12.906.576.462,02)
	JUMLAH	Rp	1.322.555.185.938,30

b. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

1) Realisasi Pendapatan Keseluruhan

Realisasi pendapatan secara total periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp619.488.837.730,00 atau mencapai 98,75 % dari target anggaran yang telah ditetapkan tahun 2010 sebesar Rp627.302.077.226,66. Pencapaian target tercermin dari terlampauinya realisasi Pendapatan Transfer dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah dibandingkan anggarannya, walaupun realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dibandingkan anggarannya.

a) Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp87.321.034.057,00 atau mencapai 107,02 % dari target anggaran sebesar Rp 81.594.254.429,50.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari :

- Pajak Daerah sebesar Rp19.710.740.857,00 atau 115,64 % dari anggaran sebesar Rp17.045.275.299,00.
- Retribusi Daerah sebesar Rp7.916.491.814,00 atau 96,54 % dari anggaran sebesar Rp8.200.258.766,50.

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp7.162.429.009,00 atau 100,00 % dari target sebesar Rp7.162.429.009,00.
- Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp52.531.372.377,00 atau 106,80 % dari anggaran sebesar Rp49.186.291.355,00. Dalam realisasi Lain-lain PAD yang Sah terdapat Pendapatan dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat sebesar Rp47.146.131.583,00 yang mekanisme penerimaannya tanpa melalui rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi tetapi melalui rekening Pemegang Kas di RSUD Cibabat.

b) Realisasi Pendapatan Transfer

- Realisasi Pendapatan Transfer berupa Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp499.667.742.297,00 atau 96,68 % apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp 515.217.487.667,16,00.
- Pendapatan Transfer terdiri dari :
- Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat) sebesar Rp 56.590.407.006,00 atau 98,44 % dari anggaran sebesar Rp57.490.032.501,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp 15.243.364.515,00 atau 91,42% dari anggaran sebesar Rp16.673.649.258,00
- Dana Alokasi Umum sebesar Rp333.439.320.000,00 atau 100,00 % dari anggaran Rp333.439.320.000,00
- Dana Alokasi Khusus sebesar Rp27.297.200.000,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp27.297.200.000,00
- Dana Penyesuaian sebesar Rp35.642.257.600,00 atau 77,28 % dari anggaran Rp46.121.732.600,00
- Dana Bagi Hasil Pajak (Provinsi) sebesar Rp31.455.193.176,00 atau 91,99 % dari anggaran sebesar Rp34.195.553.308,16,00.

c) Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

- Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp32.500.061.376,00 atau tercapai 106,59 % dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp 30.490.335.130,00.
- Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari :
- Dana Alokasi Cukai sebesar Rp 717.766.876,00 atau 149,06 % dari anggaran sebesar Rp481.540.630,00.
- Bantuan dari Provinsi sebesar Rp 31.782.294.500,00 atau 105,91 % dari anggaran sebesar Rp30.008.794.500,00.

2) Realisasi Belanja

Realisasi Belanja periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp636.201.144.912,00 atau mencapai 86,00 % dari anggaran belanja tahun 2010 sebesar Rp 739.757.920.819,66

Penjelasan lebih lanjut dari pos-pos belanja adalah sebagai berikut :

a) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp543.374.776.427,00 atau mencapai 88,61 % dari anggaran belanja tahun 2010 sebesar Rp613.240.230.014,00.

Realisasi Belanja Operasi terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp350.649.907.025,00 atau mencapai 87,67 % dari anggaran sebesar Rp399.986.271.438,00.
- Belanja Barang sebesar Rp153.396.354.446,00 atau mencapai 92,70 % dari anggaran sebesar Rp165.483.131.976,00.
- Belanja Bunga sebesar Rp1.281.377.825,00 atau mencapai 98,57 % dari anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00.
- Belanja Hibah sebesar Rp30.703.961.100 atau mencapai 83,29 % dari anggaran sebesar Rp36.862.576.600,00.
- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp7.343.176.031,00 atau mencapai 76,43 % dari anggaran sebesar Rp9.608.250.000,00.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp91.135.651.185,00 atau mencapai 74,70 % dari anggaran belanja tahun 2010 sebesar Rp121.996.021.734,00.

Realisasi Belanja Modal terdiri dari :

- Belanja Tanah sebesar Rp2.889.882.000,00 atau mencapai 24,04 % dari anggaran sebesar Rp 12.020.743.280,00.
- Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.212.154.243,00 atau mencapai 83,82 % dari anggaran sebesar Rp28.885.216.072,00.
- Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp31.307.036.193,00 atau mencapai 83,58 % dari anggaran sebesar Rp37.456.970.419,00.
- Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp31.605.998.575,00 atau mencapai 89,50 % dari anggaran sebesar Rp35.314.001.508,00.
- Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.120.580.174,00 atau mencapai 13,47% dari anggaran sebesar Rp8.319.090.455,00.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.690.717.300,00 atau mencapai 37,39% dari anggaran sebesar Rp4.521.669.071,66,00.

3) Realisasi Pembiayaan

Rekening Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarnya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

a) Realisasi Penerimaan Daerah

Realisasi Penerimaan Daerah dari Pembiayaan periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp118.854.581.450,00 atau 100,00 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp118.854.581.450,00. Jumlah sebesar Rp118.854.581.450,00 tersebut merupakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp118.854.581.450,00.

b) Realisasi Pengeluaran Daerah

Realisasi Pengeluaran Daerah yang bersumber dari Pembiayaan periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp5.235.078.310,00 atau 81,81 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.398.737.857,00. Jumlah sebesar Rp6.398.737.857,00 merupakan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari :

- Penyertaan Modal	Rp 2.800.000.000,00
- Pembayaran Pokok Pinjaman	Rp 2.435.078.310,00
- Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	Rp 0,00
Jumlah	<u>Rp 5.235.078.310,00</u>

4) Perhitungan SILPA

Realisasi Pendapatan :

a. P A D	Rp 87.321.034.057,00	
b. Pendapatan Transfer	Rp 499.667.742.297,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 32.500.061.376,00	
Jumlah a + b + c	<u></u>	Rp 619.488.837.730,00

Realisasi Belanja:		
a. Belanja Operasi	Rp	543.374.776.427,00
b. Belanja Modal	Rp	91.135.651.185,00
c. Belanja Tak Terduga	Rp	1.690.717.300,00
Jumlah a + b + c		Rp 636.201.144.912,00
Surplus / (Defisit) (I)		Rp (16.712.307.182,00)
Realisasi Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp	118.854.581.450,00
b. Pengeluaran	Rp	5.235.078.310,00
Pembiayaan Netto (II)		Rp 113.619.503.140,00
SiLPA tahun 2010 (I) + (II)		Rp 96.907.195.958,00

c. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

Arus Kas Pemerintah Kota Cimahi tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp18.617.811.745,00. Jumlah ini diperoleh dari selisih lebih arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp74.423.589.751,00, selisih kurang dari aktivitas investasi aset nonkeuangan sebesar Rp91.135.651.185,00, ditambah selisih kurang dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp5.235.078.310,00 dan selisih lebih dari aktivitas nonanggaran sebesar Rp3.329.327.999,00. Apabila penurunan arus kas tahun 2010 ditambah dengan saldo Kas per 31 Desember 2009 sebesar Rp118.854.581.450,24 maka Saldo Kas per 31 Desember 2010 berjumlah Rp100.236.769.705,24.

Saldo Kas sebesar Rp100.236.769.705,24 terdiri dari SiLPA sebesar Rp96.907.441.706,00 dan saldo utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga) sebesar Rp3.329.327.999,00. Saldo PFK merupakan Utang PFK di Bendahara Umum Daerah yang belum disetor ke Kas Negara.

SiLPA sebesar Rp96.907.441.706,00 terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp92.694.674.122,00 dan saldo Kas di para Bendahara Pengeluaran sebesar Rp73.301.150,00 serta Kas di RSUD sebesar Rp4.139.466.434,00. Dalam laporan arus kas ini tidak menyajikan saldo PFK di SKPD dan saldo jasa giro.

Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas adalah sebagai berikut :

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp74.423.589.751,00 terdiri dari:

Arus Masuk Kas	Rp	619.489.083.478,00
Arus Keluar Kas	Rp	(545.065.493.727,00)
Arus Kas Bersih	Rp	74.423.589.751,00

a) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp619.489.083.478,00 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp87.321.279.805,00 terdiri dari :

Pajak Daerah	Rp	19.710.740.857,00
Retribusi Daerah	Rp	7.916.491.814,00
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	7.162.429.009,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	52.531.618.125,00
Jumlah	Rp	87.321.279.805,00

Dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdapat Pendapatan dari BLUD RSUD Cibabat sebesar Rp47.146.131.583,00 yang mekanisme penerimaannya tanpa melalui rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi tetapi melalui rekening Pemegang Kas di RSUD Cibabat dengan nomor rekening 023.000.30.609.00

(b)Pendapatan Transfer sebesar Rp499.667.742.297,00 terdiri dari :

Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	56.590.407.006,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	15.252.807.549,00
Dana Alokasi Umum	Rp	333.439.320.000,00
Dana Alokasi Khusus	Rp	27.297.200.000,00
Dana Penyesuaian	Rp	35.642.257.600,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	31.445.750.142,00
Jumlah	Rp	499.667.742.297,00

(c)Dana Bagi Hasil Pajak (Pusat) sebesar Rp56.590.407.006,00 terdiri dari :

Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	27.989.161.204,00
BPHTB	Rp	17.021.698.713,00
PPh Pasal 21, 25 dan 29	Rp	11.579.547.089,00
Jumlah	Rp	56.590.407.006,00

(d)Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Provinsi) sebesar Rp31.445.750.142,00 terdiri dari :

Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	12.073.590.000,00
Bea Balik Nama Kend Bermotor	Rp	10.598.765.683,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	6.657.889.610,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Rp	2.026.492.883,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Rp	98.455.000,00
Jumlah	Rp	31.445.750.142,00

(e)Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp32.500.061.376,00 terdiri dari :

Dana Alokasi Cukai	Rp	717.766.876,00
Bantuan dari Provinsi	Rp	31.782.294.500,00
Jumlah	Rp	32.500.061.376,00

- b) Arus Keluar Kas untuk aktivitas operasi sebesar Rp545.073.493.727,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Rp	350.649.907.025,00
Belanja Barang	Rp	153.396.354.446,00
Bunga	Rp	1.281.377.825,00
Hibah	Rp	30.703.961.100,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp	7.343.176.031,00
Belanja Tak Terduga	Rp	1.690.717.300,00
Jumlah		<u>545.065.493.727,00</u>

Belanja Hibah sebesar Rp30.703.961.100,00 direalisasikan untuk :

- Kelompok Masyarakat/Perorangan	Rp	765.222.500,00
- Badan/Lembaga/Org. Swasta	Rp	29.938.738.600,00
Jumlah	Rp	<u>30.703.961.100,00</u>

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp7.343.176.031,00 direalisasikan untuk :

- Partai Politik	Rp	781.833.656,00
- Kemasyarakatan	Rp	6.561.342.375,00
Jumlah	Rp	<u>7.343.176.031,00</u>

Belanja Tak Terduga sebesar Rp 1.690.717.300,00 dari anggaran sebesar Rp4.521.669.071,66.

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sebesar Rp(91.135.651.185,00) terdiri dari :

• Arus Masuk Kas	Rp	0,00
• Arus Keluar Kas	Rp	(91.135.651.185,00)
• Arus Kas Bersih	Rp	(91.135.651.185,00)

a) Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah nihil

b) Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan sebesar Rp91.135.651.185,00 merupakan belanja modal berupa pembelian/ pengadaan dari:

- Tanah	Rp	2.889.882.000,00
- Peralatan dan Mesin	Rp	24.212.154.243,00
- Gedung dan Bangunan	Rp	31.307.036.193,00
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	31.605.998.575,00
- Aset Tetap Lainnya	Rp	1.120.580.174,00
Jumlah	Rp	91.135.651.185,00

3) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp(5.235.078.310,00) terdiri dari :

• Arus Masuk Kas	Rp	0,00
• Arus Keluar Kas	Rp	(5.235.078.310,00)
• Arus Kas Bersih	Rp	(5.235.078.310,00)

a) Arus Masuk Kas dari aktivitas pembiayaan adalah nihil.

b) Arus Keluar Kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp 5.235.078.310,00 adalah belanja :

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	2.800.000.000,00
- Pembayaran Pokok Pinjaman	Rp	2.435.078.310,00
Jumlah	Rp	5.235.078.310,00

4) Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran

Arus kas bersih dari Aktivitas Nonanggaran sebesar Rp3.329.327.999,00 yang terdiri dari :

• Arus Masuk Kas	Rp	14.506.500.668,00
• Arus Keluar Kas	Rp	(11.177.172.669,00)
• Arus Kas Bersih	Rp	3.329.327.999,00

a) Arus Masuk Kas merupakan penerimaan perhitungan fihak ketiga berupa :

- PPh Pasal 21	Rp	63.977.100,00
- PPh Pasal 22	Rp	635.139.557,00
- PPh Pasal 23	Rp	432.522.849,00
- PPN	Rp	11.721.497.892,00
- PPh Pasal 4 ayat(2)	Rp	1.628.668.170,00
- Lainnya	Rp	24.695.100,00
Jumlah	Rp	14.506.500.668,00

b) Arus Keluar Kas merupakan pengeluaran perhitungan fihak ketiga berupa :

- PPh Pasal 21	Rp	63.977.100,00
- PPh Pasal 22	Rp	592.853.347,00
- PPh Pasal 23	Rp	335.656.841,00
- PPN	Rp	9.068.480.794,00
- PPh Pasal 4 ayat(2)	Rp	1.116.204.587,00
- Lainnya	Rp	0,00
Jumlah	Rp	11.177.172.669,00